

**KATEGORI**

Perdagangan, Koperasi dan UKM

**SUB KATEGORI**

UMKM

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Usaha Kecil Bidang Otomotif

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Jumlah Usaha Kecil Bidang Otomotif adalah banyaknya usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang bergerak dibidang yang lebih spesifik mengenai bagian-bagian sistem yang terdapat pada kendaraan bermotor.
- Usaha Kecil Bidang Otomotif adalah suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang bergerak dibidang yang lebih spesifik mengenai bagian-bagian sistem yang terdapat pada kendaraan bermotor.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- Otomotif adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang mesin kendaraan bermotor seperti mobil dan motor.
- Otomotif berhubungan dengan sesuatu yang berputar dengan sendirinya (seperti motor dan sebagainya).
- Otomotif memiliki berbagai cabang ilmu yang lebih spesifik mengenai bagian-bagian sistem yang terdapat pada kendaraan bermotor.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

**UKURAN**

Unit

## **UNIT**

-

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah usaha ekonomi produktif dibidang otomotif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

## **INTERPRETASI**

Jumlah usaha kecil bidang otomotif menunjukkan jumlah usaha ekonomi produktif dibidang otomotif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undangundang.

## **KETERANGAN**

- Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- UMKM dalam melakukan usaha harus memiliki bukti legalitas usaha dalam bentuk :
  - a. Surat izin Usaha;
  - b. Tanda bukti pendaftaran ; atau
  - c. Tanda bukti pendataan
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Kemudahan perizinan dengan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh UMKM yang dimiliki oleh orang perseorangan WNI dan Badan Hukum Indonesia.
- Perizinan untuk UMKM dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.
- UMKM mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa indonesia kepada pejabat apabila persyaratan dokumen lengkap pejabat wajib memberikan izin usaha , apabila pejabat menolak permohonan penolakan wajib disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan, terhadap penolakan izin usaha pemohon dapat mengajukan ulang dengan melengkapi kekurangan persyaratan.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**  
DISKOPERINDAG

**DOKUMEN**  
SIPD

